

Berebut 'Rumah Tuhan'

Studi Kasus Konflik Antara Jemaat GKJW dan GPIB Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, 1975-1982

Scramble The 'Home God'

Case Studies Of Conflict Between Church GKJW and GPIB in the Village Citrodiwangsan District Lumajang Regency Lumajang, 1975-1982

Yanti Yulianti, Drs. Nurhadi Sasmita, M.Hum, Drs. Bambang Samsu B., M.Si
Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
Email: nurhadisasmita@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang sejarah sosial dengan menggunakan konsep pendekatan sosiologi agama yang mempelajari peran agama dan peristiwa-peristiwa sosial dalam masyarakat Lumajang. Peristiwa-peristiwa sosial dapat memicu terjadinya konflik sehingga menimbulkan perubahan sosial di dalam masyarakat. Dengan menggunakan bahan-bahan teori sosiologi agama dan historis, artikel ini menyelidiki pandangan, pengetahuan, dan kepercayaan yang berhubungan, khususnya dengan konflik agama yang terjadi antara jemaat GKJW dengan GPIB Lumajang. Jika manusia sudah menjadi satu kesatuan dengan agama dan kelompoknya maka manusia tersebut berani membela agamanya yang dianggap benar sehingga cenderung berusaha menyelamatkan dan membela martabat agamanya. Seperti halnya yang terjadi di Lumajang kedua aliran gereja tersebut saling mempertahankan dan memperebutkan gerejanya, sehingga terjadi konflik. Mereka masing-masing mempunyai rasa ingin membela agama yang dianggapnya benar dan rela mempertahankan kekuasaan satu sama lain.

Kata Kunci : Konflik, Jemaat GKJW, Jemaat GPIB.

Abstract

This articles concerns about social history which applies concept approach to the sociology of religion that takes up the role of religion and social occurrence in the society. By using the sociology theories and history, this article observes the viewpoint, the knowledge, and the related believe, especially the religious conflict between GKJW and GPIB Lumajang. If a human being has become an integral part of a religion and its group, he or she dares to defend his or her religion, although conflict happens. Such thing occurs in those two churches in Lumajang city. Each of them has already had a keen sense of defending something which they think it is right. They are willing to remain in power with each other, even if conflict occurs.

Keywords: Conflict, GKJW Congregation, GPIB Congregation.

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Agama pada umumnya menerangkan fakta bahwa nilai-nilai yang ada dalam masyarakat bukan sekedar kumpulan nilai yang bercampur aduk tetapi membentuk tingkatan. Di dalam tingkatan tersebut agama menetapkan nilai-nilai tertingginya yang terkait hubungannya pada tingkah laku manusia yang diyakini adanya anggota-anggota pemeluk dengan Tuhannya atau benda-benda yang ditunjukkan oleh kepercayaan agama mereka. Jadi Tuhan dianggap sebagai nilai tertinggi yang dapat membatasi tingkah laku agar lebih baik (Nottingham : 1997, 38). Makna dari agama tersebut oleh masing-masing

pemeluknya didefinisikan sebagai peraturan hidup. Hidup yang semata-mata dari Tuhan Yang Maha Esa bertujuan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya, manusia dengan sesama manusia, manusia dengan alam semesta beserta isinya. Seringkali agama juga dapat memicu terjadinya suatu konflik. Isu yang cepat menimbulkan konflik dalam masyarakat adalah isu masalah agama dan paham keagamaan. Dengan isu paham keagamaan ini penganutnya berani mengorbankan apa saja yang ada pada dirinya bahkan nyawanya (Muchtar : 2009, 157). Konflik agama sering terjadi dalam masyarakat yang terdapat berbagai ragam agama. Sebelum perang kemerdekaan konflik agama juga sering terjadi. Konflik

agama ini akibat dari hubungan sosial dalam suatu negara yang memiliki keragaman agama. Indonesia dikenal secara luas sebagai negara yang menghadapi problem khusus dalam mempertahankan persatuan, dan juga toleransi antara masyarakat. Problem lainnya adalah loyalitas utama mempertahankan perbedaan dari berbagai kelompok kedaerahan yang terdiri atas agama, bahasa, etnisitas, budaya dan tradisi. Agama di Indonesia ini di satu sisi menjadi kekayaan bangsa, namun juga menjadi ancaman yang berbahaya karena dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi sosial di masyarakat. Konflik tidak hanya terjadi karena perbedaan agama, namun dalam satu agama juga dapat terjadi konflik, sebagaimana yang terjadi di Lumajang, yakni pecahnya Kristen menjadi dua kelompok yakni Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) dengan Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB).

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah : 1). Apakah yang menyebabkan timbulnya konflik antara jemaat GKJW dengan GPIB Lumajang?, 2). Bagaimana proses terjadinya konflik antara jemaat GKJW dengan GPIB di Lumajang?, 3). Bagaimana proses penyelesaian konflik antara jemaat GKJW dengan GPIB Lumajang?, 4). Apa dampak yang ditimbulkan dari adanya konflik tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai penelitian sejarah (historis), penelitian ini bertujuan untuk : 1). Menjelaskan sebab-sebab timbulnya konflik yang terjadi antara jemaat GKJW dengan GPIB Lumajang, 2). Menjelaskan proses terjadinya konflik antara jemaat GKJW dengan GPIB Lumajang, 3). Menjelaskan proses penyelesaian konflik yang terjadi antara jemaat GKJW dengan GPIB Lumajang, 4). Menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari adanya konflik antara jemaat GKJW dengan GPIB Lumajang.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Menurut para peneliti sejarah dalam merekonstruksi masa lampau agar dapat menghasilkan karya penulisan sejarah ilmiah perlu melakukan tahap-tahap penelitian sebagai berikut (Gottschalk : 1980, 32).

Tahap pertama adalah heuristik atau tahap pencarian dan pengumpulan data yang terkait dengan studi yang hendak dilakukan. Lebih jelasnya suatu usaha untuk mencoba menemukan dan mengumpulkan data dari sumber-sumber sejarah, sumber tersebut dapat berupa sumber primer maupun sumber sekunder. Semua informasi yang didapat di lapangan akan dicatat secara cermat pada hari yang sama dengan kegiatan wawancara, dengan maksud untuk menghindari kemungkinan terlupakan atau tumpang tindih informasi antara informan yang satu dengan yang lain. Selama informan tidak mengajukan pembicaraan dilangsungkan wawancara direkam dengan menggunakan alat perekam (Endrawara : 2003, 239). Sebelum seorang peneliti dapat memulai wawancara, artinya sebelum peneliti berhadapan muka dengan narasumber maka ada beberapa soal mengenai persiapan untuk wawancara yang harus dipecahkan lebih dahulu (Koentjaraningrat : 1977, 162-163).

Tahap kedua adalah kritik sumber yaitu memberi penilaian dan penyeleksian terhadap sumber-sumber yang diperoleh, baik kritik intern maupun ekstern. Kita peroleh dapat dipertanggungjawabkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan kritik ekstern digunakan untuk mendapatkan sumber.

Tahap ketiga adalah interpretasi yaitu suatu usaha untuk menafsirkan data yang sudah didapatkan untuk dijadikan suatu rangkaian yang utuh.

Tahap keempat adalah historiografi. Historiografi dalam metode sejarah, merupakan suatu upaya menuangkan hasil dari heuristik, kritik sumber dan interpretasi dalam suatu bentuk tulisan yang kronologis dan ilmiah dengan kaidah-kaidah metode sejarah (Gottschalk : 1980, 32).

Adapun model penulisan artikel ini adalah deskriptif analitis yakni suatu cara penggambaran dengan menguraikan peristiwa yang terjadi dalam bentuk hubungan sebab akibat yang mampu menjawab apa, siapa, di mana, kapan, mengapa dan bagaimana. Model penulisan deskriptif analitis berorientasi pada pemecahan masalah yang pada hakekatnya melakukan survey, pengumpulan data, membuat kuesioner untuk memperoleh informasi dari responden dengan tujuan untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dalam peristiwa tersebut dalam jalinan kausalitas berbagai aspek yang terkait di dalamnya.

Hasil dan Pembahasan

2.1 Proses Terjadinya Konflik

Konflik tidak hanya terjadi karena perbedaan agama, namun dalam satu agama juga dapat terjadi konflik, sebagaimana yang terjadi di Lumajang, yakni pecahnya konflik antara dua kelompok yakni Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) dengan Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB). GKJW ialah sekelompok buah perkabaran injil dikhususkan untuk jemaat wilayah Banyuwangi sampai dengan Ngawi, memberi pemahaman bahwa GKJW bukan gereja suku melainkan gereja terbuka untuk segala suku di Propinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah yang dituntut untuk melayani masyarakat Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan segala aspek budayanya (Purnomo : 1998, 7). Berdirinya Gereja Kristen Jawi Wetan adalah bagian dari gereja Tuhan Yang Esa, yang dilahirkan, dipelihara dan ditumbuh kembangkan oleh Tuhan Yesus dan Roh Kudus di Bumi Jawa Timur. GPIB ialah gereja yang dimaksudkan untuk jemaat Indonesia wilayah bagian barat yakni Propinsi Sumatra, Kalimantan dan Jawa Barat. GPIB ialah gereja protestan Indonesia bagian barat yang beribadah berdasarkan firman Tuhan. melaksanakan peribadatan dengan diiringi oleh musik keagamaan.

Gedung gereja yang terdapat di Kelurahan Citrodiwangsan bernama Protestanche Gemeente Kerk. Gereja tersebut berdiri pada 1920. Gedung gereja tersebut kosong sehingga digunakan untuk orang-orang Belanda yang bekerja di pabrik gula dan perkebunan untuk beribadah. Pada masa pendudukan Jepang 1942-1945 gedung gereja tersebut ditutup. Pada tahun 1945 setelah Indonesia merdeka ditempati Tentara Republik Indonesia (TRI) sebagai markas radio Batalyon 31 Ketunggeng Lumajang. Setahun kemudian setelah kemerdekaan, gedung tersebut tidak digunakan dan kosong. Pada tahun 1946 jemaat GKJW yang diwakili oleh

Ketua Jemaat GKJW yakni Sukarno (pencetus pendirian GKJW) dan Pendeta Pinoedjo. menghadap Bupati Lumajang R. Abubakar dan Komandan Batalyon 31 Ketunggang Lumajang Moh. Wiyono. Mereka memohon gedung gereja Protestanche Gemeente Kerk yang terletak di Desa Citrodiwangsan Jalan Panjaitan, untuk difungsikan kembali sebagai rumah ibadah bagi jemaat GKJW yang berada di perkotaan Lumajang. Permohonan tersebut mendapat perhatian penuh, dan R. Abubakar selaku Bupati Lumajang menyerahkannya secara lisan kepada Sukarno selaku Ketua GKJW. Dengan tersedianya fasilitas peribadatan tersebut, akhirnya kebutuhan untuk berkumpul dan berdoa bagi jemaat GKJW terwujud (Majelis Agung Malang : 2004, 9).

Dari tahun ke tahun jemaat GKJW yang diketuai Sukarno dengan Pendeta Pinoedjo menikmati kondisi yang lancar dan aman dalam melakukan peribadatan. Pada 1970 mereka dikejutkan oleh berita bahwa Pendeta Pinoedjo akan dimutasi dan diganti oleh pendeta baru yakni Pendeta R. Setyoharjo. Pendeta Pinoedjo dimutasikan karena sudah memimpin selama 10 tahun, hal ini menjadi ketentuan dan peraturan Majelis Agung GKJW. Sukarno bersikeras menentang pergantian pendeta tersebut karena bagi Sukarno semua kesuksesan yang diperoleh adalah hasil perjuangan antara Sukarno, Pendeta Pinoedjo dan Jemaat GKJW. Sosok Sukarno sangat dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang jujur, mempunyai kepemimpinan yang tegas, orangnya berwibawah, sehingga pengikut Sukarno sangat setia berada disamping Sukarno. Akan tetapi Sukarno juga mempunyai watak keras dan tegas, sehingga pada 1959 pendeta GKJW yang bernama Prawata Dana pindah ke Tempursari, Pronojiwo Lumajang, karena tidak tahan dengan kepemimpinan Sukarno yang dianggap keras, sehingga pada 1959 GKJW tidak mempunyai pendeta. Majelis Gereja Lumajang datang ke tempat Pendeta Pinoedjo yakni di Bangkalan Madura, untuk meminta Pendeta Pinoedjo agar pindah ke GKJW Lumajang. Pendeta Pinoedjo pernah bersekolah di Holland Inderlands School. Pada saat itu Pendeta Pinoedjo menjadi pendeta misioner (Pendeta Perkabaran Injil). Pada 1960 Pendeta Pinoedjo resmi berada di GKJW Lumajang.

Hubungan Pendeta Pinoedjo dengan Sukarno sangat baik, Pinoedjo dapat membangun komunikasi yang sehat antara pendeta dengan Majelis Gereja, terutama dengan Sukarno, bukan hanya itu Sukarno beranggapan Pendeta Pinoedjo mampu memimpin GKJW Lumajang dengan baik, karena Pendeta Pinoedjo berpengaruh luas terhadap kondisi di luar gereja. pendeta Pinoedjo selain menjadi pendeta GKJW, ialah sebagai anggota DPR Lumajang, sehingga Pendeta Pinoedjo mempunyai penengaruh yang sangat luas di Lumajang, dengan mempunyai kenalan Bupati, kejaksaan dan juga yang lainnya. Pendeta mempunyai langkah-langkah untuk menghadapi Sukarno, yakni: 1. Menuruti apa kehendak yang berlaku untuk pendeta pindahan, yakni dengan mentaati segala peraturan gereja yang ada. 2. Memperhatikan kelemahan-kelemahan Sukarno. Apabila Sukarno sakit, Pendeta Pinoedjo datang dan mengunjungi dengan membawa dalam doa terhadap Sukarno agar segera sembuh, dengan begitu Sukarno merasa senang dengan Pendeta Pinoedjo yang selalu memperhatikan keadaan dan kondisi

Sukarno. 3. Menghadapi dengan sabar segala tugas yang diberikan Sukarno terhadap Pendeta Pinoedjo. Pendeta Pinoedjo menanggapi hal tersebut sebagai ujian Sukarno kepada Pendeta Pinoedjo. Misalnya, Pendeta Pinoedjo diperintahkan untuk membangun rumah Pasturi (Rumah Pendeta) yang ditempatkan di sisi kanan gereja.

Pendeta Pinoedjo diminta untuk mencari dana di Surabaya, Malang dan Probolinggo, semua itu dikerjakan dengan baik dan sabar oleh Pendeta Pinoedjo, sehingga pembangunan rumah Pasturi GKJW Lumajang berhasil. Sukarno sangat bangga dengan Pendeta Pinoedjo yang dapat menjalankan tugas mencari dana sendiri di 3 tempat yang berbeda, sehingga Sukarno tidak ingin kehilangan sosok Pendeta Pinoedjo di gerejanya (Wawancara dengan Pendeta Pinoedjo, 18-5-2013). Pada 1970 Pendeta Pinoedjo dimutasikan di GKJW Jember, hal tersebut diminta oleh Majelis Gereja Jember yang disetujui oleh PHMA Malang, sehingga di GKJW Lumajang digantikan oleh Pendeta R. Setyoharjo dari GKJW Mojokerto yang dimutasikan ke Lumajang. Pendeta R. Setyoharjo mempunyai kepemimpinan yang bagus tetapi juga sangat keras dan tegas, sama halnya dengan Sukarno yang mempunyai kepemimpinan yang sangat keras. Sukarno dengan Pendeta R. Setyoharjo sering mengalami perselisihan dan pertengkaran, Sukarno menginginkan semua permintaannya dan tugas-tugasnya dapat diselesaikan dengan baik oleh Pendeta R. Setyoharjo, namun Pendeta R. Setyoharjo tidak menuruti keinginan Sukarno.

Hal tersebut yang akhirnya memicu Sukarno tidak suka dengan sosok Pendeta R. Setyoharjo dan cenderung lebih menyukai sosok Pendeta Pinoedjo yang dapat bersahabat dan berkerja sama baik dengan Sukarno. Pemutasian Pendeta Pinoedjo ke GKJW Jember sangat ditentang oleh Sukarno dan juga antara Sukarno dengan pendeta baru tidak dapat bekerjasama dengan baik, oleh karena itu kondisi gereja sangat lemah. Jemaat GKJW menjadi pecah antara pengikut Sukarno dengan pengikut Pendeta R. Setyoharjo. Perkara-perkara dan pelayanan gereja menjadi persoalan antara pengikut Sukarno dan Pendeta R. Setyoharjo, sehingga dengan keadaan yang seperti itu Sukarno menjadi keluar dan mendirikan GPIB di Lumajang.

Tahun ke tahun setelah GPIB di Lumajang berdiri, tiba-tiba ingin memperebutkan gereja yang awalnya ditempati oleh jemaat GKJW. Sukarno mengetahui sejarah perjalanan jemaat GKJW untuk mendapatkan gedung tersebut yang awal mulanya gedung yang berada di Jalan Panjaitan ialah bukan gedung milik jemaat GKJW, sehingga Sukarno bersikeras untuk mendapatkan gereja agar dapat ditempati oleh GPIB Lumajang (Wawancara dengan Pendeta Pinoedjo, 18-5-2013.). GPIB mempunyai keinginan yang sangat besar untuk memperoleh gerejanya kembali, namun GPIB terbentur oleh keputusan Bupati Suwandi untuk menggunakan gedung gereja secara bersama-sama.

2.2 Ketegangan Memuncak Sampai Pecah Konflik

Pertemuan pada 8 Desember 1977 yang membahas tentang pemakaian gedung secara bersama-sama ternyata tidak menghentikan intrik konflik. Dengan pemakaian gedung bersama-sama tersebut ternyata memperburuk hubungan antara gereja GKJW dan GPIB. Mendengar terjadi

perselisihan lagi antara GKJW dengan GPIB Lumajang, Bupati Suwandi menjadi khawatir, mengingat semula telah disepakati pemakaian gedung gereja secara bersama-sama. Bupati Suwandi takut akan terjadi konflik yang lebih berdampak luas. Oleh sebab itu Bupati Suwandi akan mengadakan pertemuan kembali untuk membahas masalah status kepemilikan gedung gereja. Bupati Suwandi segera memerintahkan bawahannya untuk menginformasikan kepada kedua belah pihak bahwa akan mengadakan pertemuan kembali antara GKJW dengan GPIB. Pertemuan tersebut untuk membahas masalah status kepemilikan gedung gereja.

Meskipun status gereja masih dalam sengketa, GKJW Lumajang tetap mempunyai gereget menyelenggarakan rembug warga untuk membahas bukti yang akan dibawa dalam pertemuan dengan Bupati Lumajang dan GPIB. Pada 31 November 1979 rembug warga diadakan di gedung gereja Jalan Jenderal Panjaitan, membahas tentang Kitab Hukum Perdata pasal 807 yang berbunyi: "Hak pakai berakhir karena kadaluwarsa, ialah apabila si pemakai selama 30 tahun tak mempergunakan haknya". Dengan demikian GKJW menganggap GPIB tidak berhak menempati gedung itu kembali karena tidak menempati selama 30 tahun dan dianggap bukan haknya lagi. Hasil perundingan dalam rembug warga yang dilaksanakan GKJW tersebut akan dibawa sebagai bekal di dalam persidangan untuk mempertahankan gedung gereja yang dimiliki oleh GKJW.

Pada 22 Desember 1979, pertemuan yang diadakan Bupati Lumajang Suwandi dilaksanakan di gedung gereja Prosthanch Gemente Kerk. Pertemuan tersebut dihadiri oleh : 1. Bupati Suwandi, selaku Bupati Lumajang, 2. Seluruh Jemaat dan pengurus gereja GKJW, 3. Seluruh Jemaat dan pengurus gereja GPIB, 4. Sesepeh GKJW, Suradi Darmosujono, 5. Sesepeh GPIB, Amiludin, 6. Soekarno dan R. Setyohardjo, 7. R. Abubakar sebagai mantan Bupati Lumajang dan Moh. Wiyono sebagai mantan Gubernur Jawa Timur, yang menyerahkan gedung gereja Prosthanch Gemente Kerk kepada pihak GKJW secara lisan, 8. Perwakilan pegawai Kantor Agraria Lumajang (GKJW Lumajang : 1975, 15).

Pada saat pertemuan dilaksanakan jemaat GPIB mempunyai bukti lebih kuat dibandingkan dengan bukti yang dimiliki oleh jemaat GKJW. GPIB mempunyai kenalan baik dengan Dirjen Agraria Jakarta sehingga jemaat GPIB khususnya Sukarno meminta bantuan kepada Dirjen Agraria Lumajang untuk dibuatkan surat atas kepemilikan gedung Protestanche Gemeente Kerk di Jalan Panjaitan Lumajang. Dirjen Agraria Jakarta bersedia untuk membantu Sukarno, sehingga Sukarno dapat mempunyai bukti yang lebih sah atas kepemilikan gedung Protestanche Gemeente Kerk. Pada akhirnya semua cara yang dilakukan oleh pihak jemaat GKJW Lumajang menjadi sia-sia karena Jemaat GPIB memiliki surat hibah dari pemerintah daerah Lumajang, untuk kepemilikan gedung gereja Protestanche Gemeente Kerk. Surat tersebut disimpan oleh mantan pengurus gereja surat tersebut sebagai bukti kepemilikan gedung yang kuat dan otentik. Sebelum pertemuan dengan Bupati dilaksanakan, pihak jemaat GPIB sudah mempersiapkan surat dari Dirjen Agraria Jakarta yang dimilikinya.

Surat tersebut dilaporkan oleh pihak jemaat GPIB kepada Kantor Agraria Lumajang, bahwa pihak GPIB ingin mengetahui surat tersebut sah sebagai bukti yang menunjukkan kepemilikan tanah gereja Prosthanch Gemente Kerk atau tidak. Setelah diperiksa oleh pihak Kantor Agraria Lumajang, ternyata surat yang dimiliki oleh pihak jemaat GPIB adalah sah menunjukkan kepemilikan tanah dan gedung gereja tersebut. Surat tersebut diproses ulang oleh pihak Kantor Agraria Lumajang dan dinyatakan sah menunjukkan status kepemilikan tanah ialah hak jemaat GPIB Lumajang (Wawancara dengan Pendeta Pinedjo, 18-5-2013).

2.3 Upaya Penyelesaian

Pada 18 Januari 1980 GKJW mengadakan rapat bersama dengan warga jemaat di gedung gereja Jalan Jenderal Panjaitan Lumajang yang acaranya mencari dana pembelian tanah dan lokasi bangunan dan pembentukan panitia pembangunan gedung gereja GKJW. Panitia untuk pembangunan gereja GKJW yakni diketuai oleh Awijadi Soekandar, Sekretaris I yakni Pendeta Soegiri Sahijoes, Sekretaris II yakni Roesnadi. Bupati Suwandi yang saat itu juga hadir, menyarankan agar GKJW Jemaat Lumajang mencari tanah di kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto (dahulu Jalan Pelita II). Mengajukan surat-surat kepada pihak pemerintah seperti kepada Bupati untuk meminta ijin dalam pembangunan gereja GKJW yang baru, ialah tugas Ketua pembangunan gereja. Mencari dan menyelesaikan administrasi tanah agar dapat digunakan untuk pembangunan gereja GKJW yang baru, ialah tugas dan tanggung jawab Sekretaris I dan Sekretaris II, dibantu penatua Kukuh Santosa dan Harjo Prayitno (Majelis Agung Malang : 2004, 46).

Setelah itu, Jemaat GKJW masih saja mendapat desakan dari Jemaat GPIB, namun hanya sekedar desakan dan kali ini tidak sampai menimbulkan konflik kembali. Desakan tersebut berulang-ulang dan bertubi-tubi, akhirnya jemaat GKJW ikut mendorong Panitia Pembangunan yang diketuai oleh Awiyadi Soekandar supaya segera membangun gedung gereja sendiri. Dengan dorongan itu pada 22 Agustus 1981 Panitia Pembangunan mengajukan permohonan untuk memperoleh surat izin mendirikan bangunan (IMB) kepada Bupati Lumajang disertai lampiran persetujuan (tanda tangan) dari tetangga sekitarnya dan instansi terkait. Untuk meminta ijin mendirikan bangunan yang baru (IMB) di tanah yang baru. Pada saat itu Bupati Suwandi, menyanggupi permohonan dari pihak GKJW tersebut. Bupati Suwandi hanya ingin wilayah Lumajang damai kembali seperti dulu tanpa ada konflik, maka menyanggupi dan membantu permohonan GKJW tersebut. Bupati Suwandi juga membantu pihak GKJW untuk mencari tanah yang baru, agar pihak GKJW bisa mendirikan bangunan gereja yang baru, agar mempunyai tempat peribadatan yang baru juga.

Bupati Suwandi mengusulkan agar pihak GKJW membangun gerejanya di Jalan Jenderal Gatot Subroto. Letak tanah yang akan dijadikan tempat pendirian gereja tersebut sedikit jauh dari gereja GPIB. Hal itu ditekankan oleh Bupati Suwandi, agar nanti tidak terjadi kembali konflik antara dua gereja tersebut. Keputusan Bupati

tersebut disetujui oleh semua pihak gereja, sehingga pihak GKJW segera menyusun rencana untuk pembangunan gereja yang baru, agar jemaat GKJW segera memiliki tempat untuk melaksanakan peribadatnya kembali dengan hati yang tenang tanpa memikirkan adanya konflik lagi. Proses pencarian tanah dilakukan oleh Roesnadi, dengan berbekal pendapat Bupati Suwandi untuk mencari tanah di Jalan Gatot Subroto dan berbekal dana hasil dari uang kas dan hasil dari sumbangan pengurus gereja dengan jemaat gereja yang jumlah seluruhnya mencapai Rp. 3.118.000,-. Roesnadi melihat kondisi tanah yang baik sehingga Roesnadi membeli tanah yang diidam-idamkan oleh pihak GKJW yakni seluas 696 m². Tanah tersebut berharga Rp. 2.958.000,- dan juga ditambah uang administrasi Rp. 160.000,-. Tanah tersebut akhirnya sah milik GKJW. Dalam pertimbangannya yang penuh arif dan bijaksana, Bupati Lumajang Suwandi segera memberikan memo (surat pernyataan) bahwa GKJW Lumajang diizinkan membangun gedung gereja di Jalan Jenderal Gatot Subroto dengan suratnya tertanggal 24 April 1982 No: 442.2/20/457.33/82. Sambil menunggu keluarnya surat IMB yang sedang diproses, PHMJ dan Ketua Panitia Pembangunan, yakni Awijadi Soekandar sepakat bahwa peletakan batu pertama dilakukan tanggal 1 Agustus 1982 minggu pertama bertepatan dengan Penjamuan Kudus II, sepekan sebelum Hari Pembangunan GKJW.

Setelah Penjamuan Kudus usai, semua warga berduyun-duyun datang ke lokasi untuk mengikuti upacara peletakan batu pertama yang dibuka oleh Ketua Panitia Pembangunan Awijadi Soekandar, selanjutnya sambutan dari Pdt. Sardjonan selaku Sekum Majelis Agung yang sekaligus dilanjutkan peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja oleh Bupati Suwandi ([Wawancara dengan Pendeta Pamomiadi, 24-5-2013](#)). Untuk tahap kedua dalam pembangunan gereja, GKJW mendapatkan sumbangan dari jemaat GPIB berupa genteng sebanyak 10.000 biji dan bumbungan 82 biji senilai Rp. 1.282.800,-. Waktu terus berjalan, pembangunan akhirnya dapat terselesaikan pada 1986. Total dana yang tercatat yakni kurang lebih Rp. 38.711.867,-. Akhirnya pada 1986, jemaat GKJW resmi berpindah ke tempat gereja yang baru di Jalan Gatot Subroto yang diresmikan oleh Majelis Agung. Menjelang peresmian ada perabotan gereja yang masih dibutuhkan di antaranya mimbar, bangku gereja, kursi tamu dan almari. Perabotan tersebut dapat terpenuhi dari para dermawan, yakni keluarga Suwito Yosep berupa 4 mimbar gereja, komisi wanita berupa sebuah lemari, jemaat berupa kursi tamu dan GKT (Gereja Kristus Tuhan) Lumajang memberikan sumbangan berupa mimbar kecil. Pada 24 Agustus 1986 jemaat GKJW berduyun-duyun datang untuk beribadah yang pertama kalinya di gedung gerejanya, dengan disertai wajah yang berseri-seri sebagai luapan kegembiraannya atas selesainya gedung gereja yang baru dibangun dengan kerja keras. (Majelis Agung Malang : 2004, 48).

Akhirnya konflik yang terjadi antara GKJW dengan GPIB, akhirnya dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Pemerintah dan masyarakat yang awalnya dibuat sangat khawatir dengan konflik yang terjadi antara GKJW dengan GPIB Lumajang, akhirnya bisa bernafas lega. Konflik tersebut dapat diselesaikan oleh Bupati Suwandi dengan

pihak kepolisian yang pada saat itu dapat mencegah aksi anarkis yang terjadi. Dengan adanya konflik antara GKJW dengan GPIB, dapat dipetik bahwa di dalam satu agama saja dapat terjadi konflik, apalagi berbeda agama konflik pasti sangat mudah terjadi. Konflik juga dapat memberikan rasa kesolidaritasan yang tinggi dalam tiap-tiap kelompok.

2.4 Dampak Konflik

Dampak adanya konflik yang terjadi antara jemaat GKJW dengan jemaat GPIB membawa perubahan yang dapat berpengaruh positif juga dapat berpengaruh negatif. Akibat dari konflik yang positif antara lain, meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang mengalami konflik dengan kelompok lain. Dampak negatifnya ialah keretakan hubungan antarkelompok yang bertikai, perubahan kepribadian pada individu, misalnya timbulnya rasa dendam, benci, saling curiga dan lainnya, kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia, dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik.

Konflik yang terjadi di Lumajang antara jemaat GKJW dengan jemaat GPIB, memberikan dampak yang berkepanjangan terhadap sesama jemaat gereja yakni kelompok jemaat GKJW dan juga berdampak pada hubungan sosial antara kelompok jemaat GKJW dengan kelompok jemaat GPIB. Dampak konflik berpengaruh dalam kelompok jemaat GKJW, sesama anggota kelompok yang mengalami konflik, rasa solidaritas antar anggota kelompok GKJW menjadi bersatu dan saling mengerti satu sama lain dan dapat menjaga kekompakan antar kelompok maupun pribadi. Kekompakan antar anggota kelompok akan semakin terjalin dengan baik, sehingga dapat bersatu dengan mempunyai tujuan bersama agar dapat tercapai yakni menjaga keamanan dalam gereja GKJW agar konflik tidak terulang kembali.

Hal yang sama juga terjadi dalam kelompok anggota jemaat GPIB, hubungan sesama anggota kelompok jemaat GPIB akan semakin terjalin dengan baik. Akan tetapi keadaan berbeda jika hubungan antar berbeda kelompok anggota jemaat gereja jika berada di luar lingkungan gereja masing-masing. Hubungan jemaat GKJW dengan jemaat GPIB jika berada diluar lingkungan masing-masing tidak dapat terjalin dengan baik, karena konflik yang pernah terjadi antara jemaat GKJW dengan jemaat GPIB masih meninggalkan bekas diantara dua kelompok jemaat gereja tersebut. Hal ini terbukti pasca terjadinya konflik, hubungan antar dua kelompok jemaat GKJW dengan GPIB menjadi semakin jauh ([Wawancara dengan Pendeta Pinoedjo, 18-5-2013](#))

Rasa kecewa dirasakan antar kelompok jemaat GKJW dengan GPIB, sikap seperti ini juga diperlihatkan oleh pemimpin gereja masing-masing seperti Sukarno dengan Pendeta R. Setyohardjo yang tidak saling bertegur sapa jika ada suatu pertemuan dalam kerukunan umat beragama yang ada di Lumajang. Hal seperti ini yang mengakibatkan hubungan antar dua kelompok jemaat gereja menjadi semakin jauh dan tidak pernah bersatu kembali. Namun keadaan berbeda ketika Sukarno memimpin GPIB dan mencari pendeta untuk memimpin peribadatan di GPIB, setelah pasca konflik memperebutkan gedung Protestanche Gemeente Kerk yang ada di Jalan Panjaitan, keadaan jemaat

GPIB semakin menurun. Rasa ketidakcocokan jemaat terhadap tata cara peribadatan yang dilaksanakan pendeta di GPIB menjadikan jemaat GPIB banyak yang keluar dari GPIB. Jemaat GPIB menganggap tata cara pendeta GPIB melaksanakan peribadatan tidak sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat, misal yang dulunya menjadi pengikut Sukarno yang berpindah gereja dari GKJW ke GPIB merasakan peribadatan yang dilaksanakan di GPIB tidak sehalus peribadatan yang ada di GKJW, karena sebelumnya di GKJW cara peribadatan menggunakan bahasa Jawa halus dengan diiringi lantunan musik yang halus.

Berbeda halnya yang ada di GPIB sering menggunakan bahasa Indonesia yang memakai nada tidak halus seperti orang Jawa dan juga diiringi lantunan musik yang agak keras. GPIB pada waktu itu pendeta dan anggota jemaatnya bermacam-macam ada yang Batak, Ambon, Cina, Indo dan Belanda, sehingga perbedaan yang mengakibatkan jemaat GPIB yang awal mulanya dari gereja GKJW tidak merasakan kecocokan. Pasca meninggalnya Sukarno, jemaat GPIB banyak yang kembali ke GKJW, bukan hanya itu saja orang Batak, Ambon, Cina dan Belanda juga ikut berpindah ke gereja GKJW, oleh karena itu keadaan GPIB semakin sepi setelah jemaat GPIB ada yang pindah ke GKJW. Oleh sebab itu pasca setelah berpindahnya jemaat GPIB untuk masuk kembali ke GKJW memberikan dampak positif, karena hubungan antara kedua jemaat GKJW dengan GPIB dapat terjalin dengan baik kembali, sehingga hubungan jemaat GPIB dengan GKJW diluar lingkungan gereja masing-masing berubah menjadi semakin baik setelah meninggalnya Sukarno ([Wawancara dengan Pendeta Pinoedjo, 18-5-2013](#)).

Bukan hanya itu, hubungan baiknya juga diperlihatkan dengan saling bekerja sama dalam hal penyebaran ajaran agama Kristen di Lumajang. Konflik yang pernah terjadi diantara dua gereja, dianggap sudah hilang dan tidak pernah terjadi di Lumajang, agar hubungan diantara keduanya dapat terjalin dengan baik ([Wawancara dengan Ahmad Sumadi, 31-1-2013](#)). Hubungan jemaat di dalam kehidupan sehari-hari selain melaksanakan peribadatan di dalam gereja juga sebagai makhluk sosial di luar gereja. Jemaat GKJW dan jemaat GPIB mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masyarakat sekitar gereja. Sebelum terjadinya konflik, masyarakat dengan jemaat membangun kehidupan yang sangat baik, dapat dilihat ketika hari besar di masing-masing pemeluk agama, jemaat gereja baik GKJW maupun GPIB saling membantu untuk memperlancar kegiatan hari besar tersebut. Hal itu juga dilakukan oleh masyarakat yang menganut agama Islam di sekitar gereja. Ketika jemaat gereja memperingati hari besar, masyarakat sekitar gereja yang menganut agama Islam juga tidak sungkan untuk membantu memperlancar peringatan hari besar tersebut. Hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan terjadi antar pemeluk agama di Lumajang. Namun, keadaannya berbeda setelah masing-masing gereja mempunyai gereja sendiri. Peribadatan GKJW maupun GPIB menjadi semakin tenang dan lancar, tanpa harus melaksanakan peribadatan di gereja secara bergantian. Sehingga pelaksanaan peribadatan yang secara rutin dilaksanakan hari Sabtu dan Minggu, dapat dilaksanakan dengan tidak tergesa-gesa. Bukan hanya itu, hubungan antara kedua jemaat gereja GKJW dengan GPIB

Lumajang, menjadi semakin baik dan bekerjasama antara keduanya dalam hal perkembangan gereja masing-masing di Lumajang, misalnya dalam hal pengembangan kembali kegiatan-kegiatan sosial. Walaupun konflik pernah terjadi antara kedua gereja, namun jemaat kedua gereja tidak mempunyai rasa balas dendam yang berkepanjangan, sehingga hubungan baik masih dapat terjalin dengan baik.

Masyarakat Lumajang yang majemuk dan terdiri atas berbagai agama, budaya, pekerjaan, pendidikan dan perekonomian, langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi corak kehidupan Jemaat GKJW dan GPIB Lumajang. Pengaruh lingkungan masyarakat, dapat membawa dampak positif atau peluang bagi perkembangan Jemaat Lumajang, tetapi bisa juga mengakibatkan dampak negatif. Latar belakang agama yang berbeda kadangkala menyebabkan adanya kecurigaan-kecurigaan dari setiap pemeluk agama yang berbeda. Isu-isu kristenisasi maupun isu-isu tindakan destruktif dari agama lain, menyebabkan kurang harmonisnya hubungan antaragama. Walaupun demikian Jemaat GKJW dan GPIB Lumajang, baik secara lembaga maupun pribadi, berusaha terus menjalin kerja sama yang baik dengan setiap pemeluk agama maupun lembaga keagamaan yang berbeda.

Dalam konteks masyarakat seperti ini, jemaat GKJW dan GPIB Lumajang dituntut untuk selalu tanggap terhadap berbagai pergerakan, perkembangan maupun pergeseran yang ada di masyarakat Lumajang. Jemaat GKJW dengan GPIB Lumajang harus membuka diri, menjalin relasi/hubungan dengan lingkungan sekitarnya, baik dari lembaga pemerintah maupun dengan warga masyarakat setempat. Jemaat GKJW dengan GPIB Lumajang juga dituntut untuk bertindak antisipatif (tanggap), dalam arti melengkapi anggota jemaatnya dan mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai tantangan. Peran serta Jemaat GKJW dengan GPIB Lumajang dalam melaksanakan panggilan dan tanggung jawabnya harus diwujudkan terus-menerus, bersama-sama dengan setiap pemeluk agama untuk meletakkan landasan moral, etik dan spiritual yang kokoh sebagai salah satu wujud pengamalan Pancasila. Beberapa fakta tersebut dapat dikemukakan bahwa GKJW Jemaat Lumajang telah menyadari bahwa warganya adalah bagian tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia, yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk berperan aktif dalam pembangunan.

Jemaat GKJW dan GPIB Lumajang telah berupaya mengaktualisasikan/mengedepankan wawasan yang baik kemasyarakatan kebangsaan dalam kehidupan berjemaat ([Wawancara dengan Pendeta Pinoedjo, 18-5-2013](#)). Konflik yang terjadi antara GKJW dan GPIB tersebut, pemerintah mengharapakan tidak pernah terjadi kembali, karena dianggap sudah memberikan dampak yang besar terhadap masing-masing gereja dengan jemaatnya, juga dapat berdampak terhadap masyarakat sekitar gereja. Pemerintah Lumajang dapat bernafas lega pada 1 Agustus 1982, dikarenakan GKJW sudah resmi mempunyai gereja yang baru, sehingga pemerintah Lumajang tidak perlu takut akan terjadinya konflik kembali di Lumajang.

Kesimpulan

Konflik antara jemaat GKJW dengan jemaat GPIB Lumajang dipicu oleh perebutan gedung gereja Protesthanche Gemeente Kerk. Pada tahun 1946 jemaat GKJW yang diwakili oleh Ketua Jemaat GKJW yakni Sukarno (pencetus pendirian GKJW) dan Pendeta Pinoedjo. Awal masuknya GKJW Lumajang dirintis oleh Sukarno, dengan cara sedikit demi sedikit. Dari tahun ke tahun jemaat GKJW yang diketuai Sukarno dengan Pendeta Pinoedjo menikmati kondisi yang lancar dan aman dalam melakukan peribadatan. Pada 1970 mereka dikejutkan oleh berita bahwa Pendeta Pinoedjo akan dimutasi dan diganti oleh pendeta baru yakni Pendeta R. Setyoharjo. Sukarno bersikeras menentang pergantian pendeta tersebut karena bagi Sukarno semua kesuksesan yang diperoleh adalah hasil perjuangan antara Sukarno, Pendeta Pinoedjo dan Jemaat GKJW.

Lambat laun banyak pengurus dan jemaat GKJW mengundurkan diri, yang akhirnya Sukarno ikut mengundurkan diri. Sukarno mengundurkan diri lalu berpindah sekaligus mendirikan kembali Gereja GPIB. Dengan cara ini Kristen GPIB mencoba untuk hadir dan mencoba menarik perhatian masyarakat Lumajang. Awalnya masyarakat memandang GPIB sebelah mata, namun lambat laun GPIB dapat diterima di kalangan masyarakat. Adanya hal tersebut GPIB menyebarkan agamanya di wilayah Lumajang. Pada waktu itu GPIB masih belum mempunyai tempat gereja sendiri. Jemaat GPIB melaksanakan ibadah bersama di rumah jemaatnya secara bergantian. GPIB menginginkan tempat gereja yang dulu pernah dimilikinya kembali. Pada akhir 1975 GPIB mulai menyusun rencana untuk mendapatkan kembali gedung gereja Protesthanche Gemeente Kerk. Jemaat GPIB berkumpul dan mengadakan musyawarah, untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Pada saat itu musyawarah terlaksana dengan baik dan hasil yang telah dicapai ialah jemaat GPIB ingin membicarakan hal tersebut dengan para jemaat GKJW. Meskipun status gereja masih dalam sengketa, jemaat GKJW Lumajang tetap mempunyai gereget menyelenggarakan rebug warga. Pada 31 November 1979 rebug warga diadakan di gedung gereja Jalan Jenderal Panjaitan, membahas tentang Kitab Hukum Perdata pasal 807 yang berbunyi: "Hak pakai berakhir karena kadaluwarsa, ialah apabila si pemakai selama 30 tahun tak mempergunakan haknya". Dengan demikian jemaat GKJW menganggap jemaat GPIB tidak berhak menempati gedung itu kembali karena tidak menempati selama 30 tahun dan dianggap bukan haknya lagi. Pada akhirnya semua cara yang dilakukan oleh pihak jemaat GKJW Lumajang menjadi sia-sia karena jemaat GPIB memiliki surat kepemilikan gedung atas nama GPIB yang disetujui oleh pemerintah daerah Lumajang, surat tersebut sangat kuat sebagai bukti kepemilikan gedung.

Berdasarkan surat tersebut Kantor Agraria Lumajang menerbitkan Surat Sertifikat Hak Milik kepada GPIB no.256/1977 sehingga secara formal jemaat GKJW tidak mempunyai hak atas tanah dan gedung gereja tersebut. Perselisihan perebutan gedung antara jemaat GKJW dengan jemaat GPIB dimenangkan oleh GPIB Lumajang, karena

pada saat itu GPIB Lumajang khususnya Sukarno mempunyai kenalan Dirjen Agraria di Jakarta (BPN Jakarta), sehingga Sukarno mempunyai dokumen yang menjelaskan tentang kepemilikan gedung tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Endrawata, Suwandi. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, Yogyakarta : Gajah Mada University. 2003.
- GKJW. *Agenda GKJW dalam Agenda Tahunan GKJW*, Lumajang : GKJW. 1975.
- Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*. Penerjemah Nugroho Notosusanto, Jakarta : Yayasan Penerbit Universitas Indonesia. 1975.
- K. Nottingham, Elizabeth. 1997. *Agama dan Masyarakat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 1997.
- Koentjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : PT. Gramedia. 1977.
- Majelis Agung Malang, *Sejarah Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Lumajang*, Malang : Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan, 2004.
- Muchtar, Rusdi. 2009. *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia*, Jakarta : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama. 2009.
- Purnomo, Hadi. 1998. *Gereja-gereja Kristen Jawa*. Yogyakarta : Taman Pustaka Gunung Mulia. 1998.

Hasil Wawancara

- Ahmad Sumadi, Lumajang, 31-1-2013.
- Pamomiadi, Lumajang, 24-5-2013.
- Pinoedjo, Jember, 18 Mei 2013.